

Apa saja identifikasi faktor-faktor kritis pada setiap tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan keberlanjutan ?

INDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR KRITIS

PERSIAPAN				PERENCANAAN				PELAKSANAAN				KEBERLANJUTAN			
NASIONAL															
FAKTOR-FAKTOR KRITIS	PIC			FAKTOR-FAKTOR KRITIS	PIC			FAKTOR-FAKTOR KRITIS	PIC			FAKTOR-FAKTOR KRITIS	PIC		
	GKK	GP	GDP		GKK	GP	GDP		GKK	GP	GDP		GKK	GP	GDP
<ul style="list-style-type: none"> - Wadah keterpaduan program penanganan kumuh tidak ada - Kolaborasi para pihak antar kementerian, swasta dan masyarakat tidak maksimal - Tidak ada pertemuan rutin membahas keterpaduan program - Kebijakan yang diambil/diputuskan butuh waktu lama - Tidak adanya rencana kerja penanganan kumuh dan tidak tersedianya anggaran CCMU 	PIU ATR/ BPN	PMU /PIU CK Pusat	KMP	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran yang disiapkan tidak mencukupi - Seluruhan kegiatan penanganan kawasan kumuh yang direncanakan didanai oleh BPM ditunda - Lokasi kegiatan tidak masuk dalam SK Kumuh atau sebaliknya lokasi ada di SK Kumuh tetapi dana tidak ada di DIPA 	PIU ATR/ BPN	PMU/ PIU CK Pusat	KMP	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran tidak mencukupi - Kegiatan yang sudah direncanakan tidak terlaksana tepat waktu 	PIU ATR/ BPN	PMU /PIU CK Pusat	KMP	<ul style="list-style-type: none"> - Inkonsistensi rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang - Belum tersedianya aplikasi/instrumen pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program 	PIU ATR/ BPN	PMU/ PIU CK Pusat	KMP

PERSIAPAN				PERENCANAAN			PELAKSANAAN			KEBERLANJUTAN					
PROVINSI															
FAKTOR-FAKTOR KRITIS	PIC			FAKTOR-FAKTOR KRITIS	PIC			FAKTOR-FAKTOR KRITIS	PIC			FAKTOR-FAKTOR KRITIS	PIC		
	GKK	GP	GDP		GKK	GP	GDP		GKK	GP	GDP		GKK	GP	GDP
<ul style="list-style-type: none"> - Perolehan dana dari APBD untuk penanganan penangan kumuh sangat minim - Wadah keterpaduan program penanganan kumuh tidak ada di tingkat Provinsi - Tertundanya review/penyusunan dokumen RP2KP-KP/SIAP - Tidak ada pertemuan rutin membahas keterpaduan program di tingkat Provinsi - Alokasi dana operasional kegiatan Pokja PKP/PPAS Provinsi tidak tersedia - Alokasi dana untuk penanganan kumuh masih bersifat sektoral 	PEMP ROV/Pokja PKP Provinsi	Balai/PIU CK Provinsi	KMW/KMT	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada SK penetapan Satker PKP - Mobilisasi tenaga pendamping tingkat kab/kota dan kelurahan tertunda - Pelaksanaan tender untuk kegiatan skala kawasan tertunda - Lokasi dampingan tidak masuk dalam alokasi DIPA 	PEMP ROV/Pokja PKP Provinsi	Balai/PIU CK Provinsi	KMW/KMT	<ul style="list-style-type: none"> - Dana penanganan kumuh tidak tersedia/kurang di anggaran (DIPA) tahunan Provinsi - Belum siap dokumen lelang pelaksanaan kegiatan infrastruktur skala Kota - Konsultan yang di kontrak tidak memenuhi kualifikasi; - Masyarakat tidak mendapatkan manfaat program secara optimal 	PEMP ROV/Pokja PKP Provinsi	Balai/PIU CK Provinsi	KMW/KMT	<ul style="list-style-type: none"> - Integrasi pembangunan infrastruktur antar kawasan dan antar kota/kabupaten - Belum tersedianya aplikasi/instrumen pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program tingkat Provinsi - Provinsi tidak dapat menyusun kebijakan penanganan kumuh berbasis data. 	PEMP ROV/Pokja PKP Provinsi	Balai/PIU CK Provinsi	KMW/KMT

PERSIAPAN				PERENCANAAN			PELAKSANAAN			KEBERLANJUTAN					
KABUPATEN/KOTA															
FAKTOR-FAKTOR KRITIS	PIC			FAKTOR-FAKTOR KRITIS	PIC			FAKTOR-FAKTOR KRITIS	PIC			FAKTOR-FAKTOR KRITIS	PIC		
	GKK	GP	GDP		GKK	GP	GDP		GKK	GP	GDP		GKK	GP	GDP
<ul style="list-style-type: none"> - masyarakat, Pemkab/Pemko dan swasta tidak mau terlibat dalam menyelesaikan persoalan kumuh - Tidak terjadi kolaborasi penanganan kumuh di tingkat Kota/Kabupaten - Alokasi dana operasional kegiatan Pokja PKP/PPAS Kab/Kota tidak tersedia - Banyak data kumuh dengan format yang beragam di tingkat Kota/Kabupaten - Tidak adanya payung hukum untuk menyelenggarakan Program KOTAKU - Penyusunan dokumen RP2KP-KP/SIAP dan DED 	PEMK OT/KA B		Tim Korkot	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat/warga tidak mendapatkan informasi yang jelas tentang perencanaan kegiatan skala kota - Tertundanya pelaksanaan kegiatan dari hasil perencanaan - Dana tidak bisa dicarikan ke rekening kontraktor/ pihak ketiga - Belum ada SK penetapan - Pemberkasan BPM tidak bisa dilakukan - Belum ada dokumen RP2KP-KP - Belum ada dokumen rencana detil/teknis (DED) 	PEMK OT/KA B		Tim Korkot	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat/Warga tidak mendapatkan informasi tentang infrastruktur/sarana yang akan dibangun di wilayahnya - Masyarakat tidak mendapatkan informasi ttg pemanfaatan Dana BPM Tk. Kota - BPM tidak dimanfaatkan sesuai rencana (baik rencana keuangan maupun rencana kegiatan) - Pelaksanaan konstruksi tidak sesuai DED dan RAB - Dokumen Safeguard tidak diimplementasikan secara konsisten - Perubahan DED/RAB tidak disertai dokumen yang lengkap & benar - Supervisi kegiatan konstruksi (skala lingkungan & 	PEMK OT/KA B		Tim Korkot	<ul style="list-style-type: none"> - Belum tersedianya system informasi dan GIS berbasis website tingkat Kota/Kabupaten - Tidak terwujud kolaborasi penanganan kumuh antar lembaga 	PEMK OT/KA B		Tim Korkot

tidak melibatkan Pemkab/Pemko				- Survey teknis lokasi kegiatan tidak detail				kawasan) tidak optimal							
- Proses procurement lelang skala kawasan tidak sesuai prosedur;				- Masalah lahan tidak clean & clear				- Tidak adanya Shop drawing (gambar kerja) dan as built drawing (gambar akhir)							
- KAK yang di buat tdk komprehensif dan survey yg detail sehingga saat memasukan data yg ada di KAK kedalam bidding document pemilihan harus melakukan penelaahan lagi dan butuh waktu juga untuk menyesuainya hingga bisa dinyatakan siap lelang dan tayang				- Kualitas dokumen safeguard kurang optimal				- Administrasi kontrak dan pelaporan tidak lengkap							
				- Kualitas DED dan RAB tidak sesuai ketentuan											

PERSIAPAN				PERENCANAAN				PELAKSANAAN				KEBERLANJUTAN			
-----------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	---------------	--	--	--

KELURAHAN/DESA

FAKTOR-FAKTOR KRITIS	PIC			FAKTOR-FAKTOR KRITIS	PIC			FAKTOR-FAKTOR KRITIS	PIC			FAKTOR-FAKTOR KRITIS	PIC		
	GKK	GP	GDP		GKK	GP	GDP		GKK	GP	GDP		GKK	GP	GDP
- Program KOTAKU tidak dikenal di tingkat Kelurahan/Desa	Kelurahan/Desa	BKM/L KM	Tim Fasilitator	- Belum ada dokumen RPLP/NUAP	Kelurahan/Desa	BKM/L KM	Tim Fasilitator	- Masyarakat/warga tidak mendapatkan informasi yang jelas tentang rencana pembangunan/kegiatan infrastruktur di wilayahnya	Kelurahan/Desa	BKM/L KM	Tim Fasilitator	- Tidak ada BOP KPP operasional dan pemeliharaan tingkat Kelurahan/Desa	Kelurahan/Desa	BKM/L KM	Tim Fasilitator
- Perolehan dana untuk penanganan				- Perencanaan mengenai penanganan kumuh belum								- Kelembagaan yang telah			

<p>kumuh sangat minim</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat, pemda Kelurahan dan swasta tidak mau terlibat dalam menyelesaikan persoalan kumuh - Masyarakat/warga tidak dilibatkan dalam pemilihan BKM/LKM - Masyarakat/warga tidak dilibatkan dalam pembentukan forum kolaborasi Kelurahan - Masyarakat/Warga tidak diinformasikan mengenai adanya anggaran desa - Masyarakat/warga tidak dilibatkan dalam lokakarya orientasi tingkat Kelurahan/Desa - BKM/LKM yang ada tidak berfungsi 				<p>dimuat dalam dokumen perencanaan pembangunan Kelurahan/Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum disusunnya AB dan rencana O & P - Tidak diketahui pihak yang bertanggungjawab untuk pemeliharaan hasil kegiatan - besaran anggaran untuk pemeliharaan hasil kegiatan infrastruktur - Tidak ada penguatan kapasitas 				<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat/warga ada yang merasa terganggu lingkungannya/aktivitasnya saat pelaksanaan kegiatan infrastruktur (ada mobilisasi tenaga kerja, pengangkutan bahan/material, penyempitan jalan, dll) - Masyarakat tidak mendapatkan informasi mengenai proses pemberkasan untuk pencairan Dana BPM Tk. Kelurahan - Masyarakat tidak mendapatkan informasi ttg pemanfaatan Dana BPM Tk. Kelurahan - Hasil kegiatan infrastruktur tidak terpelihara; - Masyarakat tidak mendapatkan manfaat program secara optimal 				<p>terbentuk tidak mendukung terhadap penanganan kumuh</p> <ul style="list-style-type: none"> - KPP operasional dan pemeliharaan tidak ada kalau pun ada tidak berfungsi tingkat Kelurahan/Desa - Hasil-hasil kegiatan penanganan kumuh di kelurahan/desa yang telah terbangun tidak bermanfaat bagi masyarakat - Anggota LKM/BKM mayoritas anggota baru belum mengetahui tupoksinya 			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Catatan:

- GKK : Garis Kolaborasi dan Koordinasi;
- GP : Garis Pelaksana;
- GDP : Garis Dukungan Program